



Dua Aplikasi Bikin Repot

BANTUL—Dinas Pariwisata Bantul mengaku kerepotan dengan rencana penggunaan dua aplikasi bagi wisatawan yang hendak pakansi di Bumi Mataram.

Jumali, Yosef Leon
redaksi@harianjogja.com

Penerapan kewajiban memindai aplikasi *Peduli Lindungi* dan *Visiting Jogja* sebagai syarat masuk tempat-tempat wisata di DIY, akan membuat personel Dinpar kesulitan mengawasi dan mendata wisatawan, khususnya di lokasi wisata Pantai Selatan.

"Khusus Pantai Parangtritis, kami pastikan akan kesulitan dalam pengaturan. DIY kan juga telah menerapkan kebijakan wisatawan harus menggunakan aplikasi *Visiting Jogja*," kata Kepala Dispar Bantul Kwintarto Heru Prabowo, Jumat (27/8).

Menurut Kwintarto, penggunaan aplikasi *Peduli Lindungi* dan *Visiting Jogja*, bakal bikin petugas bekerja ekstra untuk memastikan pengunjung

▶ Dengan harus menggunakan aplikasi *Peduli Lindungi* dan *Visiting Jogja*, dipastikan petugas harus bekerja ekstra memastikan pengunjung benar-benar memiliki dua aplikasi tersebut.

▶ Ketua Pengelola Wisata Songgo Langit, Aris Purwanto, mengaku belum mempersiapkan diri untuk penggunaan dua aplikasi tersebut.

benar-benar memiliki dua aplikasi tersebut. Alhasil, antrean kendaraan yang masuk lewat tempat penarikan retribusi (TPR) malah bisa semakin mengular.

"Di sisi lain, tidak semua wisatawan bawa *handphone*. Untuk itu kami ajukan ke Pemda DIY, bagaimana jika *Visiting Jogja* itu terkoneksi dengan *Peduli Lindungi*. Agar lebih cepat dan tidak ada penumpukan saat pengecekan," lanjut Kwintarto.

▶ Halaman 6

Dua Aplikasi...

Dispar Bantul meminta kebijakan menggunakan dua aplikasi itu bisa ditinjau ulang, terutama bagi wisatawan yang tidak menggunakan ponsel. Sebagai gantinya, wisatawan bisa menunjukkan kartu atau sertifikat vaksin kepada petugas.

"Pertimbangannya ya itu. Kan banyak yang tidak bawa *handphone*. Toh, mereka kan punya sertifikat maupun kartu vaksin, nanti tinggal ditunjukkan saja," ungkap Kwintarto.

Sinkronisasi *Visiting Jogja* dengan *Peduli Lindungi* dan penggunaan kartu serta sertifikat vaksin disampaikan oleh Dispar Bantul pada rapat pembahasan pada Jumat (27/8). "Rapatnya baru hari ini [kemarin]. Kami usulkan hal itu," ujar Kwintarto.

Ketua Pengelola Wisata Songgo Langit, Aris Purwanto mengaku belum mempersiapkan diri untuk menggunakan dua aplikasi tersebut. Selama ini, kata Aris, wisatawan yang berkunjung di tempatnya menggunakan aplikasi *Visiting Jogja*. "Untuk *Peduli Lindungi* belum ada persiapan. Apakah nanti merepotkan jika harus pakai dua aplikasi? Kami *marut* saja. Yang penting, pariwisata segera buka," katanya.

PAD Turun

Di sisi lain, Kwintarto menambahkan adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh pemerintah telah membuat Bantul kehilangan potensi pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata Rp3 miliar dalam dua bulan terakhir. Padahal sebelumnya, saat wisata diperbolehkan buka dalam lima bulan, Pemkab Bantul masih bisa meraup pemasukan dari pariwisata senilai Rp8 miliar.

"Jika wisata sudah boleh dibuka, kami berpeluang menambah pendapatan senilai Rp4 miliar, di sisa empat bulan terakhir 2021 ini," jelas Kwintarto.

Akibat adanya penerapan PPKM, Kwintarto mengaku harus merevisi target pendapatan. Jika sebelumnya, Dispar mematok pendapatan senilai Rp24 miliar pada 2021, dalam perkembangan diturunkan menjadi Rp16 miliar karena penerapan PPKM. Sedangkan pada 2022, jika kondisi normal, Dispar menargetkan pendapatan di atas Rp20 miliar. "Namun, setelah melihat perkembangan yang ada, kemungkinan kami hanya mampu mengejar target di atas Rp12 miliar," ungkap Kwintarto.

Prokes Ketat

Sementara itu, perwakilan pedagang di kawasan Alun-Alun Utara (Altar) Jogja meminta Pemda DIY memberlakukan aturan yang logis dan mengakomodasi kepentingan masyarakat kalangan bawah pada masa penerapan PPKM berjenjang.

"Kami kira pemerintah tidak perlu membuat peraturan yang semakin menyusahkan kehidupan perekonomian rakyat kecil. Sudah minor bantuan di masa PPKM ini, ditambah PPKM terus diperpanjang. Jualan sepi kok masih mau ditambah dengan aturan yang menyusahkan," kata Denta Julian, perwakilan pedagang kawasan Altar, Jogja, Jumat.

Menurut dia, dalam praktiknya syarat penggunaan aplikasi *Peduli Lindungi* bakal bikin repot. Sebab, tidak semua PKL maupun pedagang angkringan punya fasilitas yang memadai dalam penerapan kebijakan itu. Di sisi lain, pengawasan terhadap aturan tersebut juga bakal melibatkan jumlah petugas yang cukup banyak, sehingga cukup sulit dioptimalkan di lapangan.

"Pastinya kerepotan dalam praktik pelaksanaannya, seolah-olah jajan di angkringan itu seperti jajan di mal yang fasilitasnya lebih lengkap dan pengawasannya bisa ketat.

Memang pemerintah dalam hal ini Satpol PP mau berjaga di tiap gerobak angkringan setiap saat," ujar dia. Oleh karena itu, Denta meminta agar pelanggaran aktivitas bisa dilakukan. Dengan catatan, pedagang dan juga pelaku sektor ekonomi informal tertib dengan pelaksanaan protokol kesehatan. Lagi pula, mayoritas pedagang di kawasan itu telah divaksin. "Selama pandemi ini kami dari pedagang sudah berkomitmen selalu menegakkan prokes di tiap tempat usaha kami. Namun mengingat masih masa PPKM Level 4, ditambah daya beli masyarakat yang turun serta pariwisata dan pendidikan belum jalan, kekhawatiran akan adanya kerumunan tidak akan ada karena jualan masih sepi," jelas dia.

Sebelumnya, Pemda DIY menyatakan para pengunjung di sejumlah sektor ekonomi wajib menggunakan aplikasi *Peduli Lindungi* yang menyediakan informasi data diri berupa tes *polymerase chain reaction* (PCR) perjalanan maupun informasi tentang riwayat isolasi atau kondisi kesehatan individu yang berkunjung. Mereka nantinya diharuskan men-scan kode QR yang telah disediakan di masa pelanggaran aktivitas bagi pelaku usaha.

"Nantinya seluruh aktivitas yang terkait datang ke restoran, ke mal, warteg, angkringan dan seterusnya, wajib menggunakan aplikasi *Peduli Lindungi*," ujar Sekretaris Daerah DIY, Kadarmanta Baskara Aji.

Baskara mengatakan kewajiban mengunduh aplikasi *Peduli Lindungi* tersebut untuk mengetahui seseorang apakah sudah divaksin atau belum, sudah menjalani tes PCR atau belum, dan masih menjalani isolasi atau tidak.

"Itu yang akan dipergunakan dengan cara kita men-scan QR code," kata Baskara Aji.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata 2. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005